

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya, evaluasi pelaksanaan restrukturisasi pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan menggunakan model evaluasi menurut Dunn dalam Nugroho (2008 : 473) yaitu evaluasi formal. Evaluasi formal adalah evaluasi yang melihat tujuan awal kebijakan telah tercapai atau belum tercapai. Evaluasi pelaksanaan restrukturisasi ini difokuskan kepada unsur organisasi yang dikemukakan oleh Hasibuan (2011 : 122) yaitu: (1) Manusia, (2) Sasaran, (3) Tempat kedudukan, (4) Pekerjaan, (5) Teknologi, (6) Struktur dan (7) Lingkungan.

#### **1. Evaluasi Restrukturisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan terhadap Ketahanan Pangan di Kota Bandar Lampung**

Terdapat lima unsur organisasi yang setelah dilakukan evaluasi dalam pelaksanaan restrukturisasi memiliki pengaruh terhadap ketahanan pangan di Kota Bandar Lampung yaitu :

- a. Pada variabel manusia Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana penyuluhan dalam segi kuantitas sudah memiliki sumber daya yang memadai, namun dalam segi kualitas sumber daya manusia belum memadai. Hal ini akan

memberikan dampak terhadap ketahanan pangan Kota Bandar Lampung dikarenakan sumber daya manusia yang menjalankan organisasi tidak dapat memberikan kinerja yang efektif dan efisien dalam mewujudkan ketahanan pangan.

- b. Pada variabel sasaran belum berjalan secara optimal hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa program yang belum terlaksana dan diterima dampaknya oleh masyarakat. Belum optimalnya pencapaian sasaran dan pelaksanaan program akan juga berpengaruh terhadap ketahanan pangan dikarenakan masyarakat akan terus mengkonsumsi beras dalam jumlah yang tinggi, karena tidak menerima sosialisasi yang cukup terkait program dan kebijakan yang ada.
- c. Pada variabel pekerjaan juga belum berjalan secara optimal hal ini juga akan berpengaruh terhadap ketahanan pangan dikarenakan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan tidak memberikan pelayanan publik yang maksimal dalam pemberina informasi harga strategis dan kemitraan petani. Maka upaya ketahanan pangan dengan memantau daya beli masyarakat terhadap pangan tidak dapat terakses dengan baik dikarenakan pola konsumsi masyarakat yang berbeda-beda serta upaya meningkatkan hasil produksi beras tidak dapat terlaksana dikarenakan para petani tidak dapat mengakses bentuk kemitraan yang dapat mereka lakukan untuk meningkatkan modal yang mampu juga meningkatkan produksi beras. .
- d. Pada variabel teknologi, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluha belum memiliki peralatan serta alat modern yang memadai yang dapat menunjang kinerja organisasi. Hal ini juga akan berdampak terhadap

ketahanan pangan dikarenakan masyarakat dan para petani tidak menerima sosialisasi dengan maksimal sehingga para petani akan menggunakan cara-cara serta alat tradisional dan membuat produksi padi menurun.

- e. Pada variabel lingkungan, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan memiliki lingkungan yang sangat mendukung pekerjaan organisasi. Hal ini juga akan memberikan dampak positif terhadap ketahanan pangan di Kota Bandar Lampung dikarenakan tidak hanya organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan yang mewujudkan ketahanan pangan melainkan juga instansi pemerintah lain dan masyarakat.

Untuk dua unsur organisasi lainnya yaitu tempat kedudukan dan juga struktur organisasi dalam pelaksanaannya memberikan hasil yang belum memadai untuk tempat kedudukan dikarenakan masih terapat daerah rawan pangan dan untuk struktur telah memberikan hasil yang cukup dikarenakan sudah memberikan penjelasan terhadap garis koordinasi dan pertanggung jawaban. Namun kedua unsur organisasi ini tidak memberikan pengaruh terhadap ketahanan pangan dikarenakan keduanya merupakan aturan formal yang tidak akan berubah dan tidak akan berdampak apapun. Hal ini dikarenakan faktor utama yang mempengaruhi terwujudnya ketahanan pangan adalah apabila organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dapat memaksimalkan kinerja manusia, sasaran, pekerjaan, teknologi dan juga lingkungannya. Secara keseluruhan pelaksanaan restrukturisasi pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan belum berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa unsur organisasi yang belum terlaksana secara optimal juga dan masih

terdapat beberapa sasaran atau program yang belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

## **2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan restrukturisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kota Bandar Lampung**

Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan restrukturisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kota Bandar Lampung yaitu:

### **a. Faktor pendukung pelaksanaan restrukturisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kota Bandar Lampung**

Pelaksanaan restrukturisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendukung. Faktor pendukung pelaksanaan restrukturisasi adalah Peraturan Walikota No. 92 Tahun 2011 tentang Tugas dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kota Bandar Lampung dan lingkungan yang ikut mempengaruhi pelaksanaan restrukturisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dalam menjaga Ketahanan Pangan di Kota Bandar Lampung

### **b. Faktor Penghambat pelaksanaan restrukturisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kota Bandar Lampung**

Faktor penghambat yang dihadapi saat pelaksanaan restrukturisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, jumlah lahan yang belum memadai serta peraturan disiplin pegawai yang belum diikutsertakan dalam memberikan sanksi terhadap pegawai yang lalai dalam menjalankan pekerjaannya juga menjadi

kendala dalam memaksimalkan kinerja serta dalam mewujudkan ketahanan pangan yang optimal.

## **B. Saran**

1. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan sebaiknya melakukan pelatihan serta workshop untuk dapat meningkatkan kemampuan dan keahlian bagi para pegawai yang menduduki jabatan belum sesuai dengan keahlian, kemampuan serta gelar yang dimiliki maupun para pegawai yang telah menduduki jabatan sesuai dengan keahliannya. Pelatihan dan workshop hendaknya dilakukan dalam satu bulan sebanyak dua kali.
2. Diperlukannya penambahan sarana dan prasarana berupa LCD dan alat demonstrasi atau demplot dalam upaya peningkatan pelayanan publik yang efektif dan efisien serta mampu meningkatkan kinerja pegawai dan organisasi dalam menjaga ketahanan pangan di Kota Bandar Lampung.
3. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan diharapkan dapat meningkatkan lagi pengawasan internal terhadap kinerja para pegawainya. Hal yang dapat dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan adalah melakukan inspeksi terhadap setiap Balai Penyuluh Pertanian dan juga bidang-bidang lainnya apakah telah melaksanakan pekerjaannya setiap jam kerja berlangsung serta pengawasan yang dapat dilakukan dalam hal pemeriksaan kehadiran dan Badan ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dapat mengganti sistem kehadiran yang masih manual dengan sistem kehadiran menggunakan fingerprint agar tidak ada lagi pegawai yang tidak hadir atau telat dalam melaksanakan pekerjaan.

4. Walikota Bandar Lampung sebaiknya apabila ingin melaksanakan kebijakan restrukturisasi harus diperjelas kembali aturan yang mengatur pelaksanaan kebijakan tersebut serta aturan yang ditetapkan. Seperti aturan yang ditetapkan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan yang belum terdapat point yang mengatur terkait pemberian sanksi terhadap pegawai yang tidak melaksanakan pekerjaannya. Serta Walikota Bandar Lampung juga harus terlebih dahulu melakukan analisis jabatan terhadap para pegawai yang akan ditetapkan dalam menjalankan organisasi. Hal ini agar para pegawai yang ditempatkan dapat sesuai dengan kemampuan dan keahlian serta gelar yang dimiliki.
5. Pemerintah Kota Bandar Lampung harus mampu membatasi izin pendirian bangunan baik perumahan maupun industry dengan menambah aturan perolehan izin pendirian bangunan usaha. Hal ini agar luas lahan pertanian yang digunakan digunakan untuk menjaga ketahanan pangan di Kota Bandar Lampung tidak semakin sedikit dan mengakibatkan kerawanan pangan.